

UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) GUNA MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DI KOTA SURAKARTA

(INCREASE NATIONAL HEALTH INSURANCE COVERAGE TO ACHIEVE UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) IN SURAKARTA CITY)

Putri Panyuwuning Tyas, Ana Silfia Margaretha, Ismatulizah

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana, Universitas Jember

Corresponding author:

name and affiliation: Putri Panyuwuning Tyas, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana, Universitas Jember

E-mail: putripanyuwuning@gmail.com

Abstract

Objectives: *The aim is to find out increase national health insurance coverage to achieve universal health coverage (UHC) in Surakarta city.*

Methods: *This type of research is descriptive research.*

Results: *SIPUKIS is an application to make it easier to apply for a Healthy Indonesia Card (KIS) and provide information on the results of tracking the progress of KIS proposals. PBI tracks the progress of KIS applications by APBD applicants. SIPUKIS aims to be an effort to accelerate Universal Health Coverage (UHC), providing fast, easy and transparent services, and making things easier. This has a positive impact on society as users.*

Conclusions: *The research results show that the development of the SIPUKIS application can increase the coverage of JKN membership in the city of Surakarta. The SIPUKIS currently in use needs to be continuously monitored and evaluated in order to improve services in the community and avoid bugs occurring during use.*

Keywords: *JKN-KIS, Universal Health Coverage*

Received: Oct 15, 2023 Revised: Nov 20, 2023 Accepted: Dec 10, 2023

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kesmasindo Publisher

INTRODUCTION

Kesenjangan dalam mengakses dan mendapatkan layanan kesehatan saat ini masih menjadi permasalahan dan perhatian dunia. Hal ini ditunjukkan dengan WHO menyepakati tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC). *Universal Health Coverage* (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *Universal Health Coverage* (UHC) merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi fokus dalam SDGs (sektor kesehatan), dimana sektor kesehatan merupakan sektor utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [1].

Sebagai sarana pendukung bagi pemenuhan kesehatan publik tersebut, Pemerintah telah membentuk telah membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional-Kartu Indonesia Sehat (SJSN-KIS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagai lembaga yang mengurus penyelenggaraan jaminan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan inilah, negara hadir untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata [2].

Sejak ditetapkannya kebijakan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Pemerintah, capaian kepesertaan nasional sebesar 95,75% dan jumlah masyarakat [3]. Itu artinya, mereka belum seluruhnya terlindungi kesehatannya lewat layanan JKN-KIS [2]. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan capaian kepesertaan JKN yang masih berada di bawah 90%. Jumlah peserta JKN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 32.989.184 jiwa atau sebesar 88,99% dari total jumlah penduduk. Pada awal 2022, hanya empat daerah di Jateng yang mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95% yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kudus [4].

Kota Surakarta, pada tahun 2022 cakupan jaminan kesehatan penduduk mencapai 96,73 persen. Cakupan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok jenis kepesertaan yaitu: 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 49,35 persen terdiri dari PBI APBN sebesar 30,71 persen dan PBI APBD sebesar 18,64 persen; 2) Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) sebesar 47,38 persen terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 30,46 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/

mandiri sebesar 13,83 persen dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 3,09 persen. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari 543.959 kepesertaan JKN PBI dan Non PBI pada tahun 2019 menjadi 537.868. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan kepesertaan menjadi 547.566 peserta dan pada tahun 2022 cakupan kepesertaan JKN di Kota Surakarta mencapai 559.561 peserta [5].

Upaya peningkatan capaian kepesertaan JKN sebagai wujud realisasi *Universal Health Coverage* (UHC) mengalami berbagai macam hambatan dan tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji bagaimana upaya peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) Di Kota Surakarta [6].

METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

RESULTS AND DISCUSSION

a. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Surakarta

Program JKN bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial, seperti pada kasus penyakit katastropis yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau *Universal health Coverage* (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Pelaksanaan JKN di Indonesia pada masa awal juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah adaptasi peserta dan pemberi pelayanan

terhadap sistem baru, keseimbangan sisi suplai pemberi pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap strukturisasi pelayanan kesehatan berjenjang, penyesuaian pengelolaan program publik oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan), dan kesinambungan finansial dari program JKN [5]. Untuk Kota Surakarta, pada tahun 2022 cakupan jaminan kesehatan penduduk mencapai 96,73 persen. Cakupan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok jenis kepesertaan yaitu: 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 49,35 persen terdiri dari PBI APBN sebesar 30,71 persen dan PBI APBD sebesar 18,64 persen; 2) Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) sebesar 47,38 persen terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 30,46 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/ mandiri sebesar 13,83 persen dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 3,09 persen [5].

Berdasarkan riwayat perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari 543.959 kepesertaan JKN PBI dan Non PBI pada tahun 2019 menjadi 537.868. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan kepesertaan menjadi 547.566 peserta dan pada tahun 2022 cakupan kepesertaan JKN di Kota Surakarta mencapai 559.561 peserta [5].

b. Upaya Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Surakarta

Berbagai kendala yang ada terkait cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan

Kota Surakarta melakukan inovasi berupa Sistem Informasi Pengusulan Kartu Indonesia Sehat (SIPUKIS). Hal ini dilatar belakangi oleh pengajuan berkas Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang meningkat, Pengiriman berkas menumpuk pada waktu deadline akhir pengiriman ke BPJS, waktu verifikasi dan entry data terbatas, masyarakat banyak yang menanyakan progres pengajuan KIS [5].

SIPUKIS merupakan aplikasi untuk memudahkan pengusulan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan memberikan informasi hasil tracking progress pengusulan KIS PBI tracking progress pengajuan KIS oleh pemohon APBD. SIPUKIS bertujuan sebagai upaya percepatan *Universal health Coverage* (UHC), memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, dan mempermudah. Hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai user.

Adapun manfaat yang dirasakan langsung meliputi:

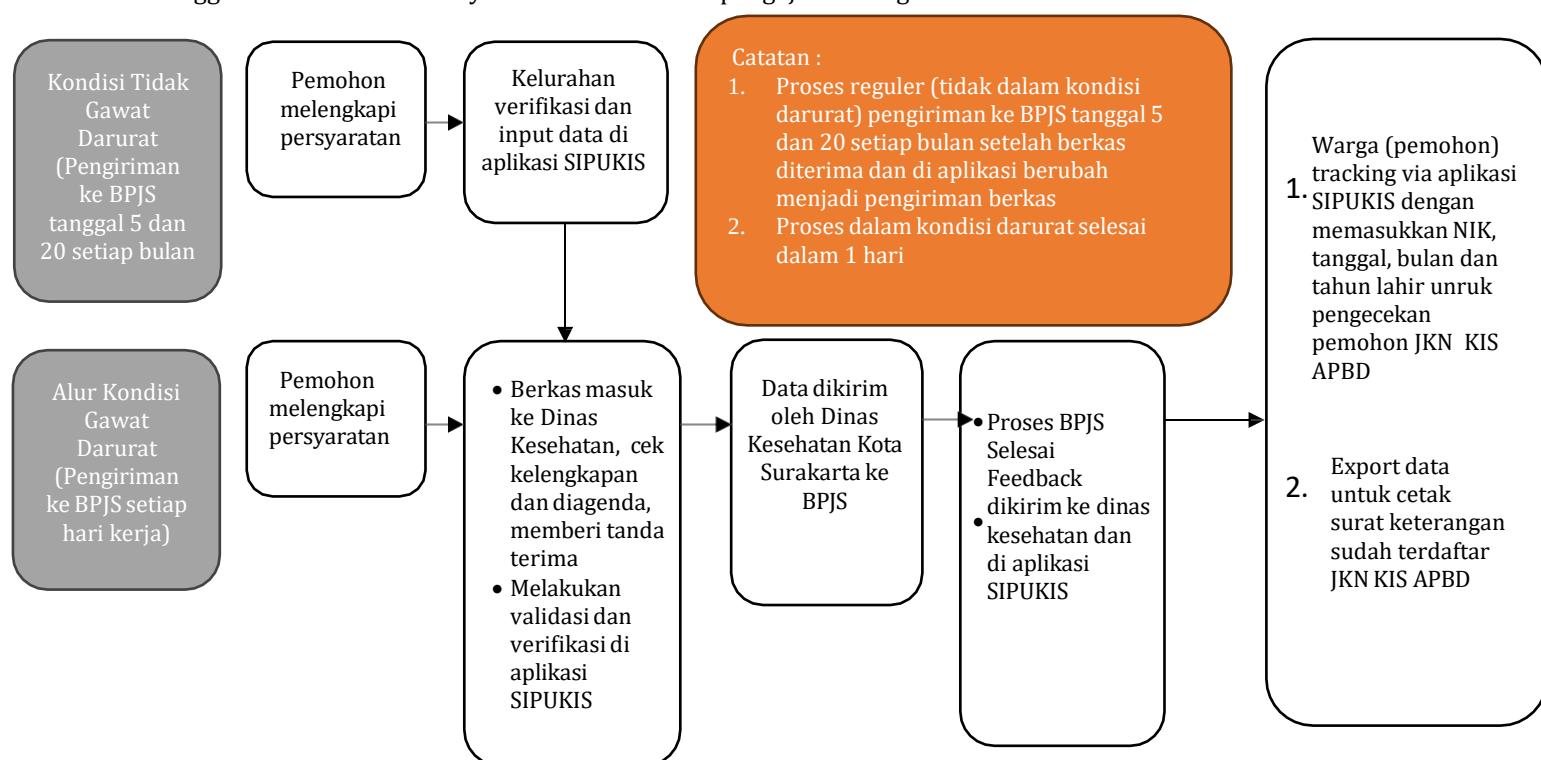
1. Masyarakat dapat langsung mengetahui dan melengkapi berkas usulan pengajuan yang belum lengkap ke kelurahan untuk di entry ke SIPUKIS
2. Masyarakat bisa tracking hasil pengusulan JKN KIS dengan memasukkan NIK dan tanggal bulan tahun lahir lewat SIPUKIS
3. Masyarakat dapat mengetahui status kepesertaan JKN KIS dengan aplikasi SIPUKIS [6].

Sebelum Aplikasi SIPUKIS diterapkan, sebelumnya telah dilakukan proses bisnis (milestone) sebagai berikut :

Tabel 1 Peta Proses Bisnis Aplikasi SIPUKIS

Planning	Strategi	Action	Monitoring	Goal
Juli-Agustus 2022: 1. Melakukan koordinasi internal inovasi sistem dan aplikasi. 2. Mengkaji anggaran APBD. 3. Mengkonsep sistem aplikasi yang akan dibuat.	September 2022: 1. Mengajukan usulan untuk mendapatkan dukungan pimpinan. 2. Mengajukan usulan dan mendapatkan dukungan lintas sektord serta stakeholder terkait.	Oktober 2022: 1. Mendapatkan dukungan dan melaksanakan sosialisasi lintas sector. 2. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas. 3. Melakukan uji coba pelaksanaan aplikasi.	November - Desember 2022 : 1. Melakukan sosialisasi ke masyarakat. 2. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi. 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan. 4. Pelaporan data hasil pelaksanaan.	Januari- November 2023: 1. Target UHC minimal 98% tercapai. 2. Tracking KIS APBD lancer.

Penggunaan SIPUKIS di masyarakat memiliki alur pengajuan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penggunaan SIPUKIS

Manfaat dari hasil implementasi SIPUKIS berdasarkan hasil evaluasi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan hasil evaluasi implementasi SIPUKIS

No	SEBELUM	SESUDAH
1	Belum adanya system yang menyediakan informasi progress kepada masyarakat sebagai pengusul/ pengajuan Kartu Indonesia Sehat yang belum maksimal	Adanya sistem/ aplikasi yang menyediakan informasi progress kepada masyarakat sebagai pengusul/ pengajuan Kartu Indonesia Sehat
2	Masyarakat banyak yang datang ke Dinas Kesehatan bertanya progress pengajuan KISnya	Masyarakat dapat mengakses melalui android informasi progress pengajuan KISnya
3	Tidak adanya bukti tertulis yang memberitahukan jika pengusulan KIS sudah selesai / sudah jadi	Ada bukti tertulis (surat keterangan) yang dapat didownload mencantumkan identitas dan nomor KIS warga

C. Kesesuaian dengan Teori

SIPUKIS merupakan pengembangan dan implementasi dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem yang terusun atas data, informasi, parameter, langkah-langkah, peranti, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berhubungan dan dikendalikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat dalam mendukung

pembangunan kesehatan [7].

Tujuan dari pengembangan SIPUKIS juga sesuai dengan konsep sistem informasi kesehatan meliputi :

1. Memberikan informasi yang berkualitas, kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan
2. Meminimalkan terjadinya duplikasi data
3. Meningkatkan keamanan data
4. Mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana
5. Mempersiapkan akses agar seluruh pengguna dapat memperoleh informasi
6. Memelihara integritas data [7].

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pengaturan SIK memiliki manfaat:

1. Memberikan jaminan terhadap kesiapan, mutu, serta akses terhadap informasi kesehatan yang memberikan pengetahuan.
2. Mengikutsertakan masyarakat dan organisasi profesi dalam melaksanakan SIK.

Merealisasikan implementasi SIK yang mencakup Sistem Kesehatan Nasional (SKN) guna memberikan hasil dan manfaat terlebih dahulu melalui upaya konsolidasi dalam hal kerjasama, pengorganisasian, penyatuan dan penyelarasan dalam kontributif pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan berkelanjutan,

CONCLUSION

Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah melaksanakan upaya peningkatan cakupan kepesertaan JKN dengan pengembangan sistem informasi kesehatan melalui SIPUKIS. SIPUKIS bertujuan sebagai upaya percepatan Universal health Coverage (UHC), memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan, dan mempermudah tracking progress pengajuan KIS oleh pemohon. Dampak dari pengembangan sistem informasi kesehatan ini adalah meningkatnya cakupan kepesertaan JKN di Kota Surakarta dan memberikan kontribusi yang tinggi bagi capaian kepesertaan JKN di Provinsi Jawa Tengah.

Pengembangan sistem informasi kesehatan berupa aplikasi SIPUKIS perlu dilakukan sosialisasi di masyarakat, sehingga penggunaannya lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat. SIPUKIS yang digunakan saat ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus guna meningkatkan layanan di masyarakat dan menghindari terjadinya *bug* saat digunakan.

REFERENCES

- [1] Hadiwijoyo, S. S., & Hergianasari, P. Strategi Salatiga Menuju Universal Health Coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. 2021; Vol. 10 No. 1, 55-74.
- [2] Adiyanta, F. S. Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*. 2020; Vol. 3 No. 2, 272-299.
- [3] BPS. *Profil Statistik Kesehatan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2023.
- [4] Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. *Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2022*. Semarang: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2023.
- [5] Dinas Kesehatan Kota Surakarta. *Profil Kesehatan Kota Surakarta 2022*. Surakarta: Dinas Kesehatan Kota Surakarta; 2022.
- [6] Dinas Kesehatan Kota Surakarta. *Data Primer*. Surakarta: Dinas Kesehatan Kota Surakarta; 2024.
- [7] Putri, S. I., & Akbar, P. S. *Sistem Informasi Kesehatan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indo; 2019.